

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah membawa dampak banyak kewenangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota. Hal ini termasuk kewenangan pengangkatan pejabat-pejabat daerah, tak terkecuali pengaturan tentang tenaga kependidikan khususnya pengangkatan jabatan Kepala Sekolah. Pengangkatan pejabat harus berdasarkan karir dan prestasi dan kebutuhan formasi yang ada. Tidak hanya berdasarkan kedekatan yang selama ini banyak dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati atau Walikota. Pada hasilnya banyak para pegawai merasa gelisah atau tidak tenang dalam bekerja apalagi pengangkatan pejabat tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berakibat rendahnya kinerja dalam hal ini mutu pekerjaan. Hal ini juga merambah di dunia pendidikan yang merupakan aset negara yang selalu didambakan oleh anak bangsa.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain dinyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparaturnegara,

khususnya Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, dengan misi tiap satuan organisasi pemerintah untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pola karier yang memungkinkan potensi Pegawai Negeri Sipil dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka misi organisasi pemerintah yang akhirnya pencapaian tujuan nasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Dengan adanya perubahan tersebut pemerintah mengharapkan adanya jalan pemecahan masalah yang ada dalam lembaga pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, baik masalah-masalah konvensional, maupun masalah-masalah yang muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru yang inovatif. Di samping itu melalui perubahan tersebut diharapkan terciptanya iklim yang

kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi.

Di lapangan masih banyak Kepala Sekolah yang belum siap mengikuti berbagai perubahan untuk menerapkan ide-ide baru di sekolahnya. Dibuktikan sampai sekarang di Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur belum diberlakukan tentang perodesasi jabatan kepala sekolah. Selain itu perhatian terhadap Kepala Sekolah selama ini relatif kurang dibanding terhadap Guru, padahal Kepala Sekolah merupakan penanggungjawab tunggal di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan Kepala Sekolah profesional yang dapat mendorong tenaga kependidikan untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas sekolah serta mewujudkan visi dan misi sekolah yang bersangkutan.

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi untuk menjadi Kepala Sekolah profesional. Banyak hal yang harus dipahami, banyak masalah yang harus dipecahkan dan banyak strategi yang harus dikuasai. Selama ini pengangkatan Kepala Sekolah hanya didasarkan kepada pengalaman menjadi guru yang diukur dari segi waktu (lamanya menjadi guru). Kelengkapan administrasi sebagai syarat umum dan adanya kedekatan dari pejabat tertentu. Hal ini terasa kurang adil, mengingat untuk menjadi Kepala Sekolah profesional perlu dimulai dari pengangkatan yang profesional pula. Demikian juga masa jabatan Kepala Sekolah, saat ini sudah tidak jamannya lagi Kepala sekolah seumur hidup. Kepala Sekolah perlu dipilih dalam kurun waktu

tertentu dan setelah itu dilakukan lagi evaluasi dan pemilihan yang baru, sedangkan Kepala Sekolah lama kembali menjadi guru. Dengan pengangkatan yang profesional diharapkan dapat memotivasi Kepala Sekolah maupun calon Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerjanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan timbul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model penugasan guru sebagai kepala sekolah yang ada di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana model yang ideal penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan sistem karier dan prestasi ?
3. Bagaimana model dalam penentuan kepala sekolah ditentukan oleh sistem penunjang keputusan agar menghasilkan keputusan yang baik dan benar ?

1.3 Batasan Masalah

Sistem pendukung keputusan yang dibuat bertujuan untuk menentukan siapa yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Oleh sebab itu, sistem ini hanya dibatasi guru-guru yang ada dalam lingkup kecamatan saja dengan golongan, karier, dan prestasi yang sudah ditentukan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung timur.

1. Keputusan yang dihasilkan akan ditentukan oleh pengguna dari sistem penunjang keputusan ini yang diambil dari syarat-syarat sebagai berikut :
 - Sudah mengikuti Diklat sebagai calon Kepala Sekolah
 - Sudah mengikuti Program S1
 - Sudah memenuhi Golongan minimal IIIc (Penata)
2. Sistem penunjang keputusan ini hanya menentukan siapa yang akan menjadi kepala sekolah.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Model penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan golongan, karier, dan prestasi yang ada di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
2. Model ideal penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan golongan, karier dan prestasi.
3. Sistem penunjang keputusan ini akan menghasilkan Kepala Sekolah yang baik dan benar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sistem analisis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

2. Sebagai model pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka promosi guru sebagai kepala sekolah.
3. Melengkapi dan menyempurnakan model penugasan guru sebagai kepala sekolah menurut Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
4. Sebagai acuan penelitian lebih lanjut dalam upaya dalam meningkatkan hasil seleksi dalam pengangkatan kepala sekolah.
5. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan agar tidak menghasilkan keputusan yang tidak efisien, sebab untuk mengantisipasi keluhan-keluhan dari Kepala Sekolah yang dipilih.

1.6 Metode Penelitian

Tahapan yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. *Study Literatur*

Penulisan ini dimulai dengan studi kepustakaan yaitu proses pengumpulan bahan-bahan referensi baik dari buku, artikel, paper, jurnal, makalah, maupun situs internet mengenai Sistem Pendukung Keputusan, serta beberapa referensi lainnya untuk menunjang pencapaian tujuan penelitian.

2. Analisis data dengan penelitian ke lapangan (*field research*)

Pada tahap ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Labuhan Maringgai, kabupaten Lampung Timur.

- a. Memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada kepala Kantor Dinas Pendidikan secara langsung.
 - b. Mengumpulkan data – data guru dari Kantor Dinas Pendidikan tersebut.
3. Merancang desain sistem
- Desain yang dirancang adalah desain user interface, Pemodelan Alur Sistem dan struktur program Sistem Pendukung Keputusan penugasan guru sebagai kepala sekolah.
4. Implementasi sistem
- Sistem diimplementasi dalam bentuk perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman Visual basic 6.0, SQL Server 2000, Crytal Report 8.5
5. Pengujian dan Analisis Sistem
- Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem, untuk mencari kesalahan-kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap fokus permasalahan penelitian, apakah sudah sesuai seperti yang diinginkan.
6. Dokumentasi Sistem
- Pembuatan laporan Skripsi lengkap dengan analisis yang didapat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian “Sistem Penunjang Keputusan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Cabang Kantor Dinas Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur”, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis data yang akan diolah dalam sistem serta membuat perancangan sistem yang akan dibangun.

BAB IV : IMPLEMENTASI

Bab ini akan menjelaskan tentang bentuk antarmuka Sistem Penunjang Keputusan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kantor Cabang Dinas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.